

BAB 1

PENDAHULUAN

Bab ini diuraikan tentang gambaran umum tentang Kota Bandung, latar belakang dilakukannya penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian dalam aspek akademis dan praktis, serta sistematika penulisan tugas akhir.

1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Bandung sebagai salah satu kota yang ditargetkan sebagai 25 kota pintar pertama di Indonesia dibentuk dengan mengikuti tahapan pengembangan kota yang dilakukan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Pembangunan *smart city* dimulai dengan penyusunan masterplan dan quickwin (Kemenkominfo dalam Indrawati, 2019:13). Pembangunan *smart city* Bandung berlandaskan pada Visi dan Misi kota Bandung seperti tercantum dalam Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2005-2025.

Menurut Bandung *smart city* (Bandung Smart City, 2020), *smart city* adalah definisi kota cerdas, yaitu cerdas sistem manajemennya, cerdas warganya dan juga cerdas pemerintah kotanya. Bandung Smart city adalah kota yang mempunyai tata kelola secara terintegrasi dan berfungsi secara maksimal dalam mengelola berbagai sumber daya Kota secara efektif dan efisien untuk dapat menyelesaikan segala tantangan dan permasalahan kota menggunakan cara-cara berupa solusi yang inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan. Dimana teknologi dapat menjadi pendorong terciptanya solusi tersebut yang ditopang oleh infrastruktur yang kuat dan sumber daya manusia yang siap untuk memberikan layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya menuju Kota Bandung yang nyaman dan dicintai. *Liveable* adalah Kota Bandung yang berfungsi secara maksimal dan dapat membuat nyaman dan layak dihuni oleh warganya. *Loveable* adalah Kota Bandung yang dicintai, yang dapat membuat warganya betah dan memberikan segala yang terbaik untuk Bandung. Bahasa

Sunda/Daerah: "Kota Bandung Matak Nyaah Matak Betah" atau dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan "Kota Bandung kota tersayang aman dan nyaman" (Bandung Smart City, 2020). Menurut Bandung Smart city terdapat enam program yang di canangkan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui, dalam mewujudkan pelaksanaan smart city. Diantaranya adalah:

1. Pemerintahan yang cerdas
2. Branding yang cerdas
3. Ekonomi yang cerdas
4. Kehidupan yang cerdas
5. Masyarakat yang cerdas
6. Lingkungan yang cerdas.

Ke enam program tersebut menjadi milestone Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan program smart city. Berikut dapat dilihat logo Pemerintah Kota Bandung pada gambar 1.1 dibawah ini.



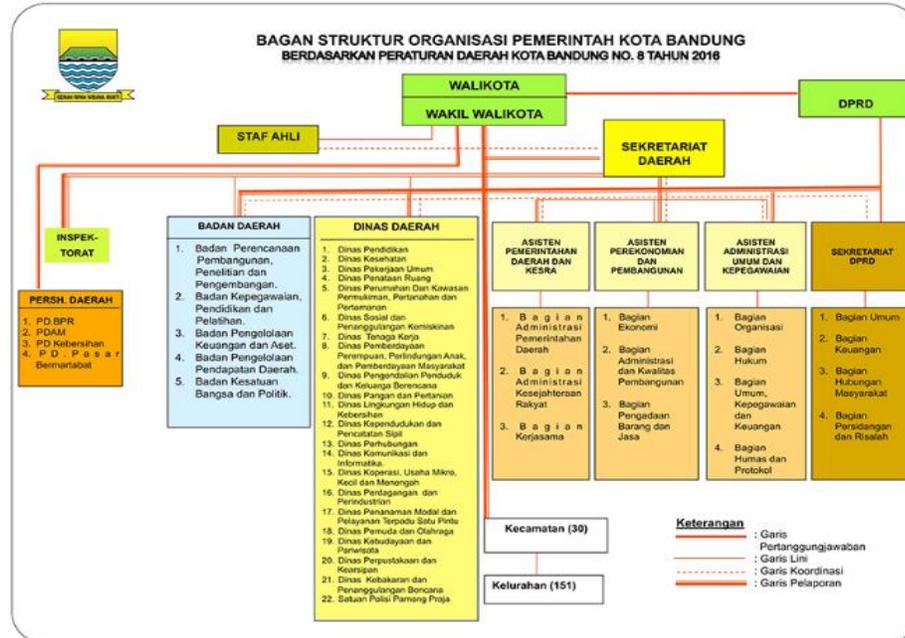
Gambar 1.1 Logo Kota Bandung

Sumber: Website Pemerintah Kota Bandung

Didalam menjalankan kegiatan pemerintahan, Pemerintah Kota Bandung memiliki Visi "Terwujudnya Kota Bandung Sebagai Kota Jasa Yang Bermartabat (Bersih, Makmur, Taat Dan Bersahabat)" dan Misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal yang religius, Yang mencakup pendidikan, kesehatan dan moral keagamaan.
2. Mengembangkan perekonomian kota yang adil, yang mencakup peningkatan perekonomian kota yang tangguh, sehat dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
3. Mengembangkan Sosial Budaya Kota yang ramah dan berkesadran tinggi, serta berhati nurani, yang mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketenagakerjaan, meningkatkan kesejahteraan sosial, keluarga, pemuda dan olah raga serta kesetaraan gender.
4. Meningkatkan penataan Kota, yang mencakup pemeliharaan serta peningkatan prasarana dan sarana kota agar sesuai dengan dinamika peningkatan kegiatan kota dengan tetap memperhatikan tata ruang kota dan daya dukung lingkungan kota.
5. Meningkatkan kinerja pemerintah kota secara professional, efektif, efisien akuntabel dan transparan, yang mencakup pemberdayaan aparatur pemerintah dan masyarakat.
6. Mengembangkan sistem keuangan kota, mencakup sistem pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, swasta dan masyarakat.

1.1.1 Struktur Organisasi



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung

Sumber: Website Pemerintah Kota Bandung

1.1.2 Prinsip Pembangunan Smart City Bandung

Mengutip dari buku Iin Indrawati, pembangunan smart city Kota Bandung dilakukan dengan mengikuti 10 prinsip (Indrawati, 2019: 14), diantaranya:

1. Mendukung dan mewujudkan Bandung ‘Bermartabat’.
2. Mendorong dan mendukung pengembangan SDM Kota Bandung
3. Pengembangan Kota Bandung dilakukan dengan konsep pembangunan berkelanjutan.
4. Penggunaan akan sumber daya Kota Bandung dengan efektif dan efisien.
5. Meningkatkan pelayanan kepada warga kota.
6. Peningkatan pemkot Bandung lebih baik dengan system kerja yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

7. Mendorong peran serta stakeholder Kota Bandung dalam mewujudkan Kota Bandung Bermartabat.
8. Pemerataan hasil pertumbuhan dan dan hasil pembangunan Kota Bandung.
9. Mendorong dan meningkatkan kualitas hidup warga kota.
10. TIK dibangun secara terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan seperti tercantum dalam laporan akhir penyusunan rencana induk Bandung Kota Cerdas.

1.2. Latar Belakang

Selama beberapa tahun terakhir, fenomena *Smart city* (Kota Cerdas) telah dianggap sebagai cara baru untuk mengubah wilayah dan memperkuat ketahanan suatu kota; namun, konsep *smart city* tersebut tidak didefinisikan dengan baik dan tidak sepenuhnya dipahami (Anthopoulos & Vakali dalam Desdemoustier *et al*, 2018). Kota Cerdas menggabungkan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, mengadopsi ICT dalam sistem perkotaan, menerapkan tata kelola baru, dan fokus pada sumber daya manusia dan mempertahankan kemampuan. *Smart city* adalah sebuah konsep perencanaan tata kota dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital yang akan membuat hidup lebih mudah dan dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi. Hal tersebut selaras dengan apa yang dikatakan Hasibuan (2019) dalam penelitian, yang menyatakan bahwa:

Kota yang maju dan berkembang dapat dilihat pada tingkat kesejahteraan yang tinggi, jumlah penduduk yang merata, sumber daya manusia yang berkualitas, mempunyai daya saing, menggunakan teknologi pada berbagai sektor, penggunaan ilmu pengetahuan yang dapat menjadi modal utama untuk kualitas kehidupan, lapangan pekerjaan yang merata, pembangunan infrastruktur yang merata, pelayanan publik yang berkualitas dan dunia usaha yang berkembang baik.

Visi dari *smart city* adalah membangun pusat masa depan masyarakat kota yang aman, lingkungan yang hijau dan efisien secara struktur baik itu energi, air, transportasi dan struktur lainnya. Infrastruktur tersebut di desain, dibangun dan di pelihara menggunakan material yang terintegrasi dengan sensor, perangkat elektronik dan jaringan yang difasilitasi oleh sistem komputerisasi dan teknologi komunikasi serta

informasi (TIK) (Indrawati, 2019: 7). Kemudian Giffinger *et al* dalam Indrawati (2019:

3) menyatakan bahwa:

Sebuah kota yang berkinerja baik dengan cara pandang ke depan dalam ekonomi, masyarakat, pemerintahan, mobilitas, lingkungan dan kehidupan, dibangun di atas kombinasi cerdas, anugerah dan aktivitas warga yang menentukan diri sendiri, mandiri dan sadar. Kota pintar umumnya mengacu pada pencarian dan identifikasi solusi cerdas yang memungkinkan kota modern meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada warganya.

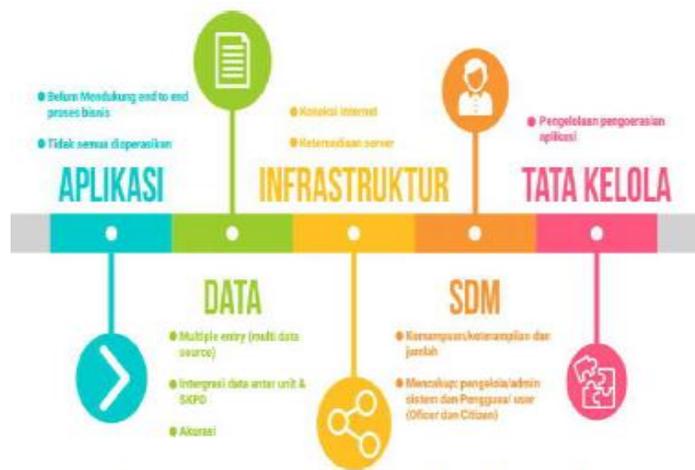
Giffinger didalam Indrawati (2019: 3) juga menjelaskan bahwa untuk mendefinisikan *smart city* dalam kaitannya dengan aspek pemerintahan ialah diartikan sebagai upaya pemerintahan dalam merespon sistem administrasi bagi masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat pada *good governance* (tata kelola) yang baik terkait administrasi pemerintahan, dan bagaimana cara pemerintah dalam berkomunikasi dan melayani yang digunakan kepada masyarakatnya. Dengan adanya teori-teori mengenai *smart city* maka negara-negara di dunia mulai melaksanakan program *smart city* untuk kota-kota terintegrasi mereka.

Di Indonesia, Konsep *Smart city* di indonesia di inisiasi oleh pakar dari Institut Teknologi Bandung, yaitu Suhono H. Supangkat. *Smart city* (kota cerdas) adalah kota yang paling cepat dan akurat memberikan solusi kepada warganya. Suhono berpendapat bahwa konsep dari *smart city* ini mempunyai beberapa dimensi-dimensi pendukung yaitu adalah *smart people, smart economy, smart governance, smart environtment, smart mobility, smart government, dan smart living* (Devega, 2017). Untuk menjalankan *smart city*, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah memulai membangun program untuk *smart city* di Indonesia, Melalui gerakan *smart city 2020*, yang di ikuti oleh 100 pemerintah Kabupaten dan Kota terpilih. Menurut Kementrian Komunikasi dan Informatika manfaat dari *smart city* dapat dilihat dari 3 area besar, yaitu dari *governance* (pemerintahan), *business* (bisnis) dan *society* (masyarakat). Mengutip pernyataan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai manfaat *smart city* untuk *governance* (pemerintahan) adalah manfaat *smart city* bagi pemerintahan Indonesia

untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi terhadap pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat juga membuat kota-kota yang menerapkan *smart city* dan menerapkan *smart governance* memiliki citra baik/positif yang dapat menarik para investor, turis lokal maupun mancanegara, dan arus perdagangan yang besar. Jika hal tersebut terwujud maka ini dapat menaikkan pendapatan daerah dan citra lebih baik/positif untuk kota tersebut sehingga kota-kota lain dapat segera menerapkan konsep dari *smart city*.

Beberapa kota di Indonesia telah mengembangkan konsep *smart city* karena pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dengan memanfaatkan TIK (Pribadi *et al*, 2020). Salah satu kota yang sudah menerapkan konsep *smart city* adalah Kota Bandung. Kota Bandung sudah menerapkan konsep *smart city* sejak tahun 2013 dan pada *Smart city Expo World Congress 2015* Kota Bandung dinominasikan menjadi finalis *world smart city award 2015* (Suhendra, 2017).

Dalam menjadikan Kota Bandung sebagai kota yang berlabel *smart city* tidaklah mudah. Menurut data dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung menyebutkan masih banyak permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan *smart city* di kota Bandung (Mursalim, 2017). Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan *smart city* di Kota Bandung tersebut dapat dilihat pada gambar 1.3 Di bawah ini:



Gambar 1.3 Permasalahan *Smart city* di Kota Bandung

Sumber: Mursalim (2017)

Menurut gambar 1.3 tentang permasalahan *smart city* di Kota Bandung terdapat lima permasalahan utama yaitu, Permasalahan pertama yaitu mengenai aplikasi, pemerintah Kota Bandung dalam rangka mendukung penerapan *smart city* daerah telah menghibahkan 9 aplikasi untuk memudahkan pelayanan masing-masing daerah (Mursalim, 2017), namun pada pelaksanaannya masih terjadi berbagai kendala. diantaranya tidak semua aplikasi dioperasikan dengan baik, masih belum mendukungnya *end to end* proses bisnis. permasalahan yang terjadi terkait aplikasi yaitu karena masih belum memadainya infrastruktur pendukung penggunaan aplikasi tersebut. Permasalahan kedua yaitu mengenai infrastruktur, pada hal ini infrastruktur masih belum memadai sepenuhnya untuk mendukung kegiatan *smart city*. permasalahan yang terjadi di antaranya adalah pada segi teknis yaitu kabel jaringan (koneksi) yang belum sepenuhnya terpasang dengan baik. lalu permasalahan lainnya yaitu masih belum tersedianya server inti untuk semua proses yang menggunakan jaringan internet, sehingga semua data data masih belum sepenuhnya terkumpul di dalam satu server.

Permasalahan ketiga yaitu terkait data, pada hal ini ada beberapa masalah yang masih terjadi terkait data antar SKPD di kota bandung yaitu belum terintegrasinya data antar SKPD di Kota Bandung, masih terjadinya multiple entry data, dan akurasi data yang masih kurang tepat. permasalahan terkait data ini kemungkinan masih ada hubungannya terkait infrastruktur yang belum memadai. Permasalahan ke empat terkait sumber daya manusia, yaitu terkait kemampuan, keterampilan, jumlah dan mencakup pengelolaan admin serta sistem pengguna. Dalam implementasinya penempatan pegawai di Pemerintahan Kota Bandung masih belum sesuai dengan *skill* yang dimiliki, sehingga Pemerintah Kota Bandung melakukan perekrutan tenaga *outsourcing* khususnya dalam bidang IT (Mursalim, 2017). Permasalahan ke lima terkait pengelolaan. satu contohnya adalah perilaku birokrasi. Seperti contoh pada pengurusan perizinan masih terdapat banyaknya para aparatur sipil Pemerintah Kota Bandung yang bekerja dengan lamban sehingga, terkadang Walikota atau Wakil Walikota yang harus turun tangan sendiri ke untuk melakukan sidak ke lapangan.

Dalam hal ini, penelitian ini menyoroti permasalahan terkait sumber daya manusia yang merupakan aspek penting dalam pelaksanaan *smart city*. Dapat dilihat pada gambar 1.3 Terdapat permasalahan yang menyangkut dengan sumber daya manusia yaitu terkait kemampuan, keterampilan, jumlah dan mencakup pengelolaan admin serta sistem pengguna/user. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Sarana Prasarana Telematika dan Kepala Sub Bagian Umum di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintahan Kota Bandung, tindak lanjut atau sikap para pelaksana kebijakan, Jika suatu pelaksana kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan harus mengetahui dan memiliki kemampuan dan memiliki kesiapan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Menurut Kepala Sub Bagian Data dan Informasi di Dinas Pendidikan Kota Bandung Rahmat Muttaqin menyatakan:

“Bahwa pada Tahun 2020 masih terjadi permasalahan terkait pelaksanaan smart city/smart governance di Kota Bandung. Diantaranya adalah terkait sumber daya manusia yang masih kurangnya dalam memiliki kesiapan secara digital serta tata kelola yang masih belum baik. Menurut Kasubag Data dan Informasi Dinas Pendidikan Kota Bandung menambahkan bahwa pada Dinasnya masih adanya rangkap pekerjaan sebagai operator dan guru, selain itu pada Dinas Pendidikan masih menggunakan tenaga outsourcing terkait pengelolaan Teknologi dan Informasi”.

Begitupun dengan Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Bandung Tri Lazuardi menyatakan:

“Digital readiness (kesiapan digital) sangat di perlukan, karena dapat membuat efisiensi dalam bekerja serta ke akuratan dalam pengumpulan data. Tri Lazuardi menambahkan pada lingkungan Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Bandung masih terdapat permasalahan dalam menghadapi era digital ini. Salah satu diantaranya adalah Sumber Daya Manusia, yang dimana masih adanya Aparatur Sipil Negara yang tidak ingin meng-upgrade diri dan meleak akan teknologi sehingga menimbulkan permasalahan umum yang dirasakan oleh beberapa Dinas lainnya di Kota Bandung.”

Menurut Edward III dalam Leo (2008:158-159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik yang digunakan untuk melihat sejauh

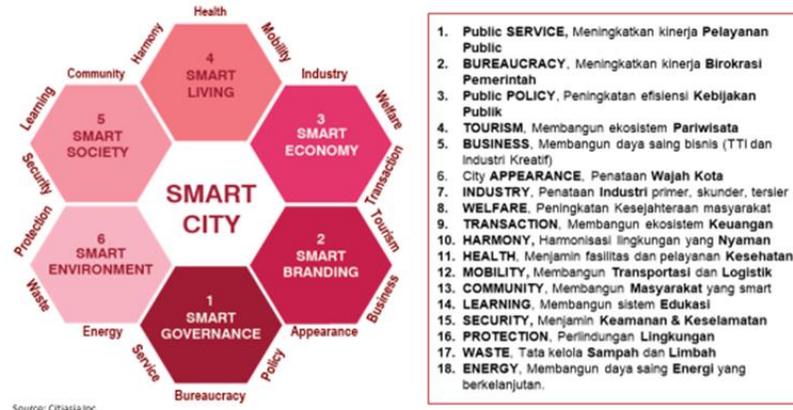
mana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan. Kemudian Nadiv *et al* (2017) juga menyatakan bahwa:

SDM berperan aktif dalam menjalankan bisnisnya, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi organisasi, berkonsultasi dengan dan kepada anggota organisasi lainnya dalam proses pengambilan keputusan dan berfokus pada menemukan cara untuk meningkatkan organisasi mereka dan memberikan hasil organisasi yang lebih baik.

Menurut Amladi (2017) sumber daya manusia, alat-alat teknologi baru dan data analitik (*Big Data*) membantu mengatasi tantangan utama, sekaligus mendukung tenaga kerja yang sangat produktif dan efektif. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Amladi diatas tersebut, maka dapat dikatakan bahwa karyawan adalah bagian penting dari organisasi, dan ini harus dipertimbangkan untuk mewujudkan digital transformasi, maka perlu mendidik dan meningkatkan produktivitas dan afiliasi karyawannya terhadap transformasi digital. Menurut beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dan sumber daya manusia merupakan suatu permasalahan penting yang harus disolusikan. Dalam implementasinya penempatan pegawai di Pemerintahan Kota Bandung masih belum sesuai dengan skill yang dimiliki, sehingga Pemerintah Kota Bandung melakukan perekrutan tenaga *outsourcing* khususnya dalam bidang IT (Mursalim, 2017).

Dalam pelaksanaannya, *smart city* ditunjang dari berbagai aspek, aspek yang menjadi tolak ukur dalam penerapan *smart city* adalah aspek elemen/dimensi dalam pembangunan *smart city*. Dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi merilis elemen-elemen/dimensi sebagai penunjang pelaksanaan *smart city*, elemen pembangunan *smart city* tersebut dapat dilihat pada gambar 1.4 Dibawah ini.

Elemen Pembangunan Smart City



Gambar 1.4 Elemen Pembangunan Smart City

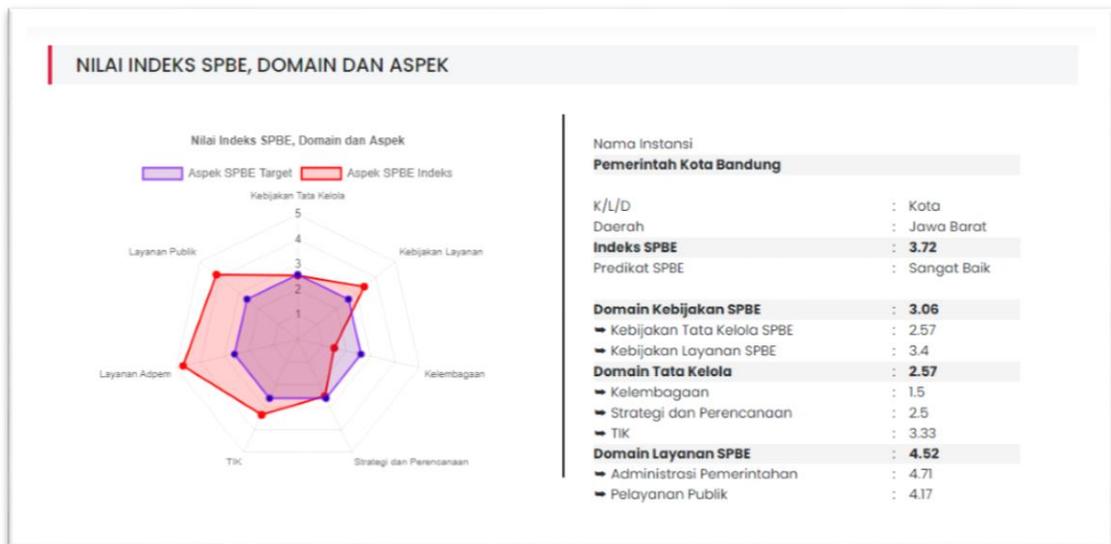
Sumber: *Guideline Masterplan Smart City Kemenkominfo, (2019)*

Berdasarkan gambar 1.4 di atas dapat dilihat elemen-elemen/dimensi pembangunan *smart city*. Terdapat 6 elemen/dimensi pembangunan *smart city* yaitu *smart governance*, *smart branding*, *smart economy*, *smart living*, *smart society*, dan *smart environment*. Ke enam elemen/dimensi tersebut merupakan faktor-faktor utama untuk menerapkan *smart city* pada suatu kota.

Smart Governance di dalam dimensi *Smart City* merupakan sebuah konsep dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara pintar, yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan *business process* yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif, transparan dan akuntabel serta selalu melakukan perbaikan. *Smart governance* memiliki dua fondasi utama yaitu *smart government* dan *e-Government*. *Smart Government* merupakan salah satu elemen dasar yang harus dipenuhi untuk mewujudkan *smart city*. Secara umum, *smart government* adalah istilah yang merujuk pada pengimplementasian *Information Communication Technology (ICT)* pada layanan publik di bidang pemerintahan secara efektif. Sedangkan *e-Government* adalah upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan

pelayanan publik secara lebih baik. Di Indonesia, pemerintah Indonesia juga memperkenalkan layanan *e-government* bagi warganya, layanan *e-Government* di Indonesia disebut sebagai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan adanya *e-Government* dapat menciptakan budaya pemerintahan yang baik (*good government*), hal tersebut dapat dilihat dari “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003” sebagai landasan didalam pengembangan *e-government* di Indonesia. Lebih lanjut pada tahun 2018 pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang “Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)” untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Maka dari itu Kota Bandung yang sudah menerapkan konsep *smart city* dan menerapkan *smart governance* di lingkungan pemerintahannya mendapatkan skor baik berdasarkan nilai indeks SPBE. Menurut situs Spbe.go.id berdasarkan nilai indeks SPBE, Domain dan Aspek Instansi Pemerintah Kota Bandung memiliki indeks SPBE sebesar 3.72 dan mendapat predikat SPBE sangat baik. Sedangkan untuk Domain kebijakan SPBE 3.06, Domain tata kelola 2.57, dan Domain layanan SPBE sebesar 4.52 maka berdasarkan data pada situs Spbe.go.id Pemerintah Kota Bandung dapat dikatakan memiliki kesiapan yang baik dalam menghadapi transformasi digital dan dalam pelaksanaan *e-government*/SPBE. Berikut ditampilkan gambar nilai indeks SPBE, Domain dan Aspek pada gambar 1.5 di bawah ini.



Gambar 1.5 Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek

Sumber: Spbe.go.id

Smart governance memiliki dimensi-dimensi pendukung yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaannya. Dimensi-dimensi pendukung tersebut diantaranya adalah *Strategies for implementing smart governance* dan *Outcomes of smart governance*. *Strategies for implementing smart governance* adalah sebuah dimensi yang memiliki indikator penting dalam melaksanakan *smart governance*. Indikator tersebut adalah legislasi, kebijakan, penggunaan Teknologi Informasi (TIK), visi integral untuk *smart city* (kota pintar), dan tata kelola pemerintah yang kolaboratif. Indikator-indikator tersebut dapat menjadi alat ukur terhadap *outcomes of smart governance*. *Outcomes of smart governance* adalah suatu hasil utama dari *smart governance*. Hasil utama ini meliputi Pertumbuhan ekonomi, layanan yang berpusat pada warga negara, keterlibatan sosial, kinerja ekologis, interaksi dengan warga, branding kota yang kuat, pemerintah yang lebih efisien, warga negara berpendidikan tinggi, kesiapan untuk penanggulangan bencana.

Maka dari itu dalam pelaksanaan *smart governance* diperlukan strategi pengimplementasian yang baik untuk mendapatkan performa terbaik dari *smart*

governance. Karena pada dasarnya dalam pelaksanaan *smart governance* tidak luput dari strategi implementasi yang menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang dapat menghasilkan performa terbaik dari *smart governance* dan dapat berpengaruh dalam mewujudkan *smart city*. Menurut (Giffinger *et al* 2007 dalam Lopes, 2017) percaya bahwa *smart governance* merupakan salah satu kategori kota pintar, yang mencakup semua aspek yang berkaitan dengan partisipasi politik, layanan sipil, dan fungsi pemerintah daerah.

Digital readiness (kesiapan digital) adalah tahap perkembangan yang menggambarkan kecenderungan, keinginan dan kemauan untuk mengambil tindakan. Yang dapat mengubah model kerja bisnis dan struktur industri saat ini untuk menciptakan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya (Nasution *et al*,2018). Oleh karena itu, kesiapan digital diartikan sebagai tren dan kesediaan untuk beralih dan mengadopsi teknologi digital, dan menggunakan teknologi ini untuk memungkinkan individu, organisasi, industri, dan negara mencapai tujuan mereka lebih cepat dan lebih besar untuk menciptakan peluang inovasi baru (Nasution *et al*, 2018). Menurut Westermann *et al* (2014) dalam Nasution *et al* (2018) membuktikan keberhasilan suatu organisasi dengan kesiapan digital yang baik akan menghasilkan performa yang baik. Tingkat performa organisasi yang memiliki kesiapan digital tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan organisasi yang memiliki tingkat kesiapan digital yang lebih rendah.

Melihat fenomena dan beberapa fakta yang telah dijabarkan dari latar belakang penelitian diatas, maka penelitian ini akan melakukan penelitian untuk mengukur pengaruh *digital readiness* dan *strategies for implementing smart governance* terhadap *outcomes of smart governance* untuk mewujudkan *smart city*. Penelitian ini akan mengambil judul “pengaruh *digital readiness* dan *strategies for implementing smart governance* terhadap *outcomes of smart governance* untuk mewujudkan *smart city*”.

1.3. Perumusan Masalah

Menurut Pratama (2014:44) Kota pintar atau *smart city* adalah sebuah konsep dari pengembangan, penerapan dan pengimplementasian teknologi yang digunakan pada suatu daerah atau perkotaan sebagai sebuah interaksi antara berbagai sistem-sistem yang ada di dalamnya. Tujuan dari Smart city adalah untuk dapat mencapai informasi dan pengelolaan tata kota yang terintegrasi dengan sistem. Suatu integrasi dapat dilakukan melalui sebuah manajemen jaringan digital geografi suatu perkotaan, sumber daya manusia, lingkungan, sosial dan ekonomi. Dalam implementasinya *smart city* tidak luput dari adanya peran transformasi secara digital dimana daerah atau kota yang menerapkan *smart city* sudah mulai untuk melakukan pengembangan, penerapan transformasi digital untuk menghubungkan manusia, informasi dan elemen kota dengan menggunakan teknologi baru. Kemudian *smart governance* dapat diartikan sebagai *smart city governance*, dimana komponen tata kelola biasanya menitik beratkan pada tata kelola pemerintah daerah, karena merupakan institusi yang bergantung pada kehidupan perkotaan. Oleh karena itu, *smart governance* dalam dimensi *smart city* merupakan visi dari tata kelola yang dilaksanakan secara bijak, yaitu dapat mengubah corak birokrasi tradisional, menghasilkan tata kelola proses bisnis yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif, transparan, dan bertanggung jawab.

Menurut Bandung Smart city Forum (2020) *smart government*, dan *e-government* merupakan fondasi dari *Smart governance* pada *Smart city*. Oleh karena itu, untuk mendukung terwujudnya Bandung *Smart city*, *e-government* telah menjadi bidang penelitian yang terkenal dalam penelitian sistem informasi. Dalam penelitian sebelumnya, istilah *digital government*, *e-governance*, dan *e-government* seringkali identik karena semuanya berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan penyampaian layanan publik. *Smart city* dan *smart governance* merupakan contoh dari transformasi digital yang menggunakan ICT dan dalam penerapannya di perlukan kesiapan digital (*digital readiness*) untuk menunjang kinerja dalam pengimplementasian smart city dan smart governance.

Digital readiness adalah tahap perkembangan yang menggambarkan kecenderungan, keinginan dan kemauan untuk mengambil tindakan. Pada saat yang sama, angka didefinisikan sebagai alat dan aplikasi teknologi digital. Itu harus dapat mengubah model kerja bisnis dan struktur organisasi saat ini untuk menciptakan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya. (Nasution *et al*, 2018). Menurut Ayanso *et al* (2011) dalam Zuntini & Sanchez (2019) Indeks kesiapan *e-government* telah dimotivasi oleh kebutuhan untuk mengembangkan ukuran umum untuk menilai kesiapan berbagai negara untuk melakukan transformasi ke tata kelola elektronik.

Untuk dapat menjadikan sebuah kota/kabupaten menjadi smart city dibutuhkan kesiapan dari berbagai faktor. Nam & Pardo (2011) mengatakan bahwa penerapan smart city terdiri atas beberapa unsur utama yaitu: teknologi (infrastruktur hardware dan software), sumber daya manusia (kreatifitas, diversity, dan pendidikan), dan institusi (tata kelola dan kebijakan). Infrastruktur teknologi diperlukan untuk menghubungkan berbagai sektor layanan. Sumber daya manusia yang kompeten dibutuhkan untuk penanganan dan pengembangan fasilitas seperti jaringan, software dan berbagai infrastruktur teknologi lainnya. Sedangkan tata kelola dan kebijakan diperlukan sebagai panduan, dasar pelaksanaan, dan payung hukum implementasi smart city.

Kesiapan Kota Bandung dalam mempersiapkan *smart city* belum terlalu maksimal, terutama di infrastruktur teknologi informasi dimana Jaringan komputer yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum terkoneksi secara tersentralisasi. Setiap OPD memiliki jaringan internetnya sendiri serta mengelola jaringan komputer dengan anggarannya masing-masing. Untuk jaringan lokal (local area network), pada umumnya OPD sudah menggunakan wireless access point (Wi-Fi), namun pada saat pengumpulan data ditemukan masih ada OPD yang tidak terkoneksi internet. OPD yang tidak memiliki koneksi internet, menurut hasil wawancara, dikarenakan anggaran untuk pembayaran jasa internet yang terbatas. Proses pembuatan surat menyurat ataupun penyimpanan data-data memang sudah

menggunakan komputer, namun untuk keperluan pengiriman data masih dilakukan secara manual dengan menyimpan file ke dalam flashdisk dan diantar ke instansi yang dituju.

Selain itu kesiapan Sumberdaya Manusia juga di perhitungkan saat ini semu kalangan aperatur negara sudah mengerti akan TIK, akan tetapi kemampuan yang harus di perbaiki adalah troubleshooting, mengkonfigurasi software dan hardware. Kondisi ini dikarenakan sebagian besar responden bukan berlatar belakang pendidikan komputer, atau pernah mengenyam pelatihan yang berhubungan dengan komputer. Pada umumnya responden maupun aparatur pada umumnya hanya bertindak sebagai user atau pengguna aplikasi, dimana teknis penggunaan beberapa aplikasi perkantoran diperoleh dari bimbingan teknis atau pelatihan-pelatihan singkat yang diselenggarakan oleh instansi

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh digital readiness dan strategies for implementing smart governance terhadap outcomes of smart governance untuk mewujudkan smart city di lingkungan Pemerintah Kota Bandung selaku pelaksana dalam mewujudkan smart city.

1.4. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini mengangkat beberapa pertanyaan yang akan menjadi dasar serta batasan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana tingkat persepsi variable *outcomes of smart governance* pada aparatur sipil negara Pemerintah Kota Bandung?
- 2) Bagaimana tingkat persepsi variable *strategies for implementing smart governance* pada aparatur sipil negara Pemerintah Kota Bandung?
- 3) Bagaimana tingkat persepsi variable *digital readiness* pada aparatur sipil negara Pemerintah Kota Bandung?

- 4) Apakah *Digital readiness* memiliki pengaruh positif terhadap Outcome of *Smart governance*?
- 5) Apakah *Strategies for implementing smart governance* memiliki pengaruh positif terhadap Outcome of *Smart governance*?
- 6) Apakah *Digital readiness* dan *Strategies for Implementing* memiliki pengaruh positif terhadap Outcome of *Smart governance*?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diajukan pada bagian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana tingkat persepsi variable *outcomes of smart governance* pada aparatur sipil negara Pemerintah Kota Bandung?
- 2) Untuk mengetahui bagaimana tingkat persepsi variable *strategies for implementing smart governance* pada aparatur sipil negara Pemerintah Kota Bandung?
- 3) Untuk mengetahui bagaimana tingkat persepsi variable *digital readiness* pada aparatur sipil negara Pemerintah Kota Bandung?
- 4) Untuk mengetahui *Digital readiness* memiliki pengaruh positif terhadap Outcome of *Smart governance*
- 5) Untuk mengetahui *Strategies for implementing smart governance* memiliki pengaruh positif terhadap Outcome of *Smart governance*
- 6) Untuk mengetahui *Digital readiness* dan *Strategies for Implementing* memiliki pengaruh positif terhadap Outcome of *Smart governance*

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini dapat dilihat dari 2 (dua) aspek berikut:

1.6.1 Aspek Teoritis

Dari segi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan serta referensi untuk penelitian berikutnya yang akan dilakukan oleh penelitian selanjutnya dengan menggunakan variabel Penelitian yang akan mengukur pengaruh *digital readiness* dalam pelaksanaan *smart governance* untuk mewujudkan *smart city* pemerintah kota bandung.

1.6.2 Aspek Praktis

Dari segi praktis sendiri, diharapkan penelitian ini akan memberikan referensi serta masukan yang ditawarkan peneliti dari segi akademis untuk meningkatkan dan memperbaiki pengaruh *digital readiness* dalam pelaksanaan *smart governance* untuk mewujudkan *smart city* pemerintah kota bandung.

1.7. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Berdasarkan pemilihan objek penelitian yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya, maka ruang lingkup objek penelitian ini adalah sebagai berikut:

Lokasi Penelitian: Jl. Wastukencana No.2, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung,
Kota Bandung, Jawa Barat 40117

Objek Penelitian: Pemerintah Kota Bandung

1.8. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan disusun dalam lima bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini diuraikan mengenai kajian pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu sehingga dapat menemukan kesenjangan penelitian dan menentukan posisi penelitiannya. Dalam bab ini juga membahas proses pembentukan kerangka pemikiran dari penelitian ini.

Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, operasional variabel, tahapan penelitian, pengumpulan data beserta sumber data, validitas dan reliabilitas, serta teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini diuraikan mengenai karakteristik responden dan hasil penelitian. Data tersebut dianalisis dalam pembahasan hasil penelitian.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan usulan saran dalam aspek akademis dan praktis.